



## Pengaruh Jejaring Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Efektifitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

Irfandi\*<sup>1</sup>, Dedy Heriwibowo<sup>2</sup>, Reza Muhammad Rizqi<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia  
E-mail: [irfansubatic@gmail.com](mailto:irfansubatic@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-01	The purpose of this research is to see the influence of the governance network in increasing the effectiveness of the preparation of the LPPD in West Sumbawa Regency. This research is a quantitative study using the Structural Equation Modeling (SEM) analysis tool which processes data based on a sample from a population which will then be analyzed using certain statistical methods. The population and sample in this study were the heads of sub-divisions for program development or apparatus that handled the LPPD, planners, and district LPPD drafting teams of 60 respondents. The validity and reliability tests carried out in this study used a data analysis method known as Partial Least Square (PLS). PLS is an equation that belongs to the field of Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study show that the game management variable indicators that affect the effectiveness of the LPPD preparation are leadership commitment related to the involvement of the OPD head in data fulfillment (KP4), coordination indicators, and team building indicators. While the variable network structuring indicators in the governance network which include outreach, joint secretariat, and budget support influence the effectiveness of the preparation of the LPPD in West Sumbawa Regency.
<b>Keywords:</b> <i>Effectiveness; Preparation of LPPD; Governance Network.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-01	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh jaringan tata kelola dalam meningkatkan efektifitas penyusunan LPPD di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang mengolah data berdasarkan sampel dari suatu populasi yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik tertentu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para kasubbag pengembangan program atau perangkat yang menangani LPPD, perencana, tim penyusun LPPD kabupaten sebanyak 60 responden. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikenal dengan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan persamaan yang termasuk dalam bidang Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan variabel manajemen permainan indikator yang mempengaruhi efektifitas penyusunan LPPD adalah komitmen pimpinan terkait keterlibatan ketua OPD dalam pemenuhan data (KP4), indikator koordinasi dan indikator team building. Sedangkan variabel indikator penataan jaringan dalam jaringan pemerintahan yang meliputi penjangkauan, sekretariat bersama dan dukungan anggaran berpengaruh terhadap efektifitas penyusunan LPPD di Kabupaten Sumbawa Barat.
<b>Kata kunci:</b> <i>Efektivitas; Penyusunan LPPD; Jaringan Tata Kelola Pemerintahan.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Boakye, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai aturan pelaksanaannya bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah

Daerah yang terdiri atas: capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas; capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati atau Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pada pelayanan administratif. Salah satu tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Bentuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah oleh Sekretariat Daerah diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Sekretariat Daerah yaitu melalui penyusunan dokumen laporan pemerintahan yang terdiri dari LPPD, menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), melakukan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Petunjuk Teknisnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barat harus menyusun LPPD yang di dalam mencakup 4 (empat) laporan berbeda dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan secara bersamaan sampai batas waktu 31 Maret tahun pelaporan. Adapun 4 (empat) laporan tersebut antara lain: LKPJ akhir Tahun Anggaran, RLPPD, SPM, dan LKjIP. Dengan adanya penggabungan laporan tersebut maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Pemerintahan harus berinovasi bagaimana agar semua laporan tersebut tersampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat hasil maksimal dalam evaluasi

Pada Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, khususnya oleh Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan saat ini khususnya subbagian Kerjasama dan otonomi Daerah sebagai leading sector dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Pemerintahan dalam hal ini Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah dibantu oleh 2 orang staf PNS beserta 2 orang staf Pegawai

Tidak Tetap sebagai pengolah data dan penyusun laporan, melihat kondisi aparatur diatas maka sangat sulit bagi pemerintah daerah khususnya bagian pemerintahan untuk dapat menuntaskan target penyelesaian LPPD tepat waktu, karena dengan amanat PP13 tahun 2019 laporan yang disusun meliputi 3 (tiga) laporan ditambah dengan laporan SPM. Dalam dua dekade terakhir, literatur tentang tata kelola pemerintahan dan jaringan tata pemerintahan telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Beberapa penulis dalam teori jaringan tata pemerintahan telah memunculkan gagasan dan praktik manajemen dalam paradigma baru yang dikenal dengan tata pemerintahan baru (New Public Governance/NPG), (Klijn & Koppenjan, 2012). Perkembangan teori jaringan tata pemerintahan yang menjadi paradigma baru dalam pelayanan publik diharapkan dapat menangani kompleksitas, saling ketergantungan dan juga dinamika pemecahan masalah publik dan pemberian layanan, yang gagal ditangani oleh NPM. Teori jaringan tata pemerintahan telah berkembang menjadi perspektif teoretis yang lengkap dan disertai dengan praktik organisasi dan managerial yang matang.

Teori terbaru tentang jaringan tata pemerintahan dibangun di atas perkembangan ilmu organisasi, ilmu politik, dan administrasi publik selama kurun waktu 40 tahun. Dalam 40 tahun tersebut terdapat 3 kategori utama dalam penelitian tentang jaringan tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Jaringan Kebijakan

Kategori penelitian ini didasarkan pada tradisi dalam ilmu politik yang berfokus pada partisipasi aktor dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan dan mereka yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap pengambilan keputusan. Kategori ini berfokus hubungan antara negara dan kelompok kepentingan (dan pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan publik).

2. Hubungan antar organisasi dan implementasi kebijakan

Kategori penelitian ini berasal dari teori organisasi yang mengadopsi perspektif antar organisasi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa organisasi membutuhkan sumber daya dari organisasi lain untuk kelangsungan hidup mereka dan oleh karena itu suatu organisasi berinteraksi dengan organisasi lainnya yang berimplikasi pada munculnya jaringan antar organisasi. Perhatian utama dalam penelitian ini ditujukan pada layanan yang lebih komp-

leks. Jaringan dianggap sebagai kendaraan dalam penyampaian dan juga implementasi layanan. Fokus kategori penelitian ini ada pada koordinasi (mekanisme) dalam penciptaan produk dan hasil yang konkrit dan juga pada masalah koordinasi dalam memberikan layanan publik dalam pengaturan yang terfragmentasi.

### 3. Pengelolaan jaringan

Kategori penelitian ini utamanya digunakan dalam bidang administrasi publik yang berfokus pada pemecahan masalah kebijakan publik melalui dan dalam jaringan. Penelitian ini menekankan pada kompleksitas pengambilan keputusan yang terlibat dalam mencapai hasil kebijakan. Penelitian ini berfokus pada keberadaan jaringan yang melibatkan inisiatif dan implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus dalam merekonstruksi dan meningkatkan jaringan dan proses pengambilan keputusan yang terjadi di dalamnya terutama pada pemecahan masalah kebijakan yang kompleks melalui koordinasi horizontal antara aktor yang juga saling bergantung. Penelitian pengelolaan jaringan juga membahas proses musyawarah antara aktor, termasuk kemungkinan hasil dan konflik nilai yang muncul ketika aktor mencoba untuk mencapai solusi yang bisa diterapkan untuk masalah kebijakan. Peneliti dari kategori penelitian ini berasumsi bahwa proses tata pemerintahan dalam jaringan merupakan konsekuensi dari dan berkembang bersama, pembangunan masyarakat jaringan (post-)modern (Castells, 2000).

Konsep mengenai networks governance muncul sebagai dampak dari kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2012). Berkembangnya persoalan-persoalan publik menyebabkan pengambilan keputusan menjadi semakin kompleks sehingga semakin terbuka peluang bagi munculnya pilihan atau alternatif kebijakan yang lebih beragam. Faktor ini yang menjadi alasan keterlibatan berbagai aktor (stakeholders) dan institusi dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Keterlibatan multi-aktor dalam proses jejaring pemerintahan membutuhkan manajemen atau tata kelola yang tepat dalam menyusun strategi mengelola jejaring pemerintahan sehingga penyusunan LPPD Kabupaten Sumbawa Barat dapat lebih efektif. Guna melakukan hal tersebut di atas, penulis berupaya untuk melakukan penelitian

pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku koordinator penyusunan LPPD di Kab. Sumbawa Barat menggunakan strategi jaringan tata pemerintahan yang dikemukakan oleh (Klijn & Teisman, 1999) dalam Yudiantmaja et al., (2017). Dalam penelitian ini teori efektivitas yang digunakan adalah teori efektivitas menurut Menurut Sedarmayanti (2009:60) efektivitas dapat diukur melalui, diantaranya:

1. Input, yaitu suatu pedoman yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dimana input mempunyai pengaruh terhadap hasil.
2. Proses, dapat diartikan sebagai komponen system yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para pemakainya.
3. Hasil (output), yaitu suatu bentuk keluaran dari input yang diolah melalui proses sehingga menghasilkan output dengan bervariasi.
4. Produktivitas, yaitu perbandingan dari efektivitas keluaran dan efisiensi salah satu masukan yang mencakup kuantitas, kualitas atau sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan (Suri et al., 2022).

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Istilah PLS secara spesifik berarti adanya perhitungan optimal least square fit terhadap korelasi atau matrik varian. PLS merupakan analisis persamaan Structural Equation Model (SEM). SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Hubungan yang rumit tersebut dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang dibangun antara satu atau beberapa variabel endogen dengan satu atau beberapa variabel eksogen. Kemudian, variabel-variabel tersebut akan terbentuk faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa indikator yang diobservasi atau diukur langsung. Ghazali (2008) mendefinisikan SEM-PLS sebagai metode analisis powerfull karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan variabel laten untuk kemudian diprediksi. Pemilihan PLS pada penelitian ini didasarkan

pada karakteristik data pada model SEM-PLS yang sesuai dengan ukuran sampel yang dikemukakan Hair et al (2013) bahwa tidak ada masalah identifikasi atau model tetap dapat diestimasi dengan ukuran sampel kecil. Hal tersebut menguatkan peneliti untuk memilih PLS karena sesuai dengan jumlah sampel penelitian ini yang berjumlah 60 responden. Analisis PLS yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.0 yang dioperasikan melalui komputer.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Uji validitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018). Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.** Model Pengukuran SEM-PLS

Indikator	Model Akhir
<b>Jejaring Tata Kelola Pemerintahan; Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1)</b>	
KP4	0.872
PT5	0.854
PT6	0.9
PT7	0.757
PT8	0.918
KO2	0.71
KO4	0.927
KO5	0.907
<b>Network Structuring (X2)</b>	
SB1	0.908
SB2	0.898
SB3	0.908
SS1	0.912
SS2	0.913
SS3	0.911
AG1	0.803
AG2	0.81
AG3	0.846
<b>Efektifitas (Y)</b>	
IN1	0.913
IN2	0.919
IN3	0.921
PS1	0.928
PS2	0.946
HS1	0.913
HS2	0.919
PR1	0.918
PR2	0.944

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 1 dari hasil Outer loading diatas, terdapat 8 indikator pada konstruk Jejaring Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1) yang memiliki nilai outer loading dibawah 0.7 yaitu indikator KP1, KP2, KP3, PT1, PT2, PT3, PT4, KO1, dan KO3. Hal

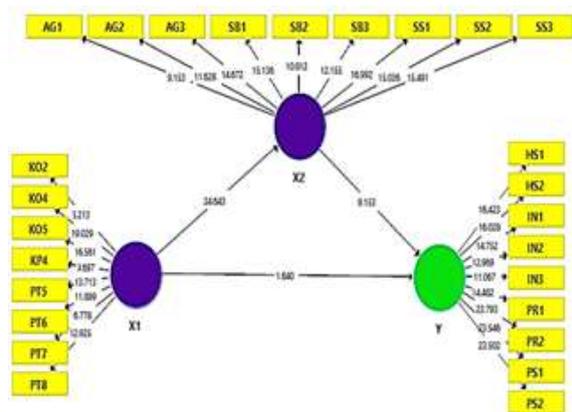
tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur konstruk terhadap Efektivitas. Oleh karena itu, kedelapan indikator tersebut dinyatakan tidak valid, dan harus dikeluarkan dari model secara bersamaan. Adapun tujuan dikeluarkannya indikator tersebut agar nilai outer loading pada model memenuhi syarat convergent validity. Selanjutnya dilakukan estimasi kembali pada model untuk menguji validitasnya kembali. Pada gambar 2 Output Calculate Algorithm SEM-PLS Setelah Modifikasi. Modifikasi model dilakukan untuk mengeluarkan indikator-indikator yang dapat memiliki nilai outer loading dibawah 0.7. Pada model modifikasi sebagaimana pada Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa semua loading factor memiliki nilai diatas 0.7, sehingga indikator untuk semua konstruk sudah tidak ada yang harus dieliminasi lagi dari model.

**Table 2.** Output Cronbach Alpha Dan Composite Reliability SEM-PLS

Konstruk	Cronbach Alpha	Composite Reliability	Ket.
Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1)	0.948	0.957	Reliabel
Network Structuring (X2)	0.963	0.969	Reliabel
Efektifitas (Y)	0.978	0.981	Reliabel

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh nilai cronbach's alpha dan composite reliabilitas yang berada diatas 0.60 dan 0.70 sebagaimana kriteria yang telah direkomendasikan. Dalam penelitian ini, pada variabel konstruk eksogen Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1) secara langsung berhubungan dengan Variabel konstruk Endogen Efektifitas (Y), dan juga kemudian melalui Variabel Konstruk Eksogen Network Structuring (X2), sehingga membuat model hubungan antar konstruk yang sesuai dengan penelitian.



Gambar 1. Output Calculate Algorithm

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pengukuran nilai indikator dalam penelitian direfleksikan oleh konstraknya masing-masing. Hal ini berarti bahwa tanda panah ditarik dari setiap konstruk laten menuju konstruk manifestnya. Evaluasi Goodness of Fit pada outer model dilakukan dengan melihat menilai Convergent Validity, Discriminant Validity, Cronbach's Alpha (CA), Composite Reliability (CR), Average Variance Extracted (AVE), dan nilai t Statistik setiap indikator (setelah proses bootstrapping). Berikut adalah hasil evaluasi dari outer model dalam penelitian ini.

Tabel 3. Goodness Of Fit-Outer Model

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1)	0.948	0.955	0.957	0.737
Network Structuring (X2)	0.963	0.967	0.969	0.774
Efektifitas (Y)	0.978	0.978	0.981	0.852

Sumber: Data diolah 2022

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria convergent validity, discriminant validity, cronbach's alpha, composite reliability dan average variance extracted (AVE). Selanjutnya, Evaluasi Goodness of Fit inner model atau model struktural yang akan dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk dengan melihat dari nilai R-square, Q-square untuk relevansi prediksi dan F-square untuk effect size. Adapun hasil output pada PLS Algorithm sebagai berikut:

1. Model struktural yang memiliki R-square > 0,67 mengindikasikan bahwa pada model dinyatakan baik, R-square > 0,33 mengindikasikan bahwa model dinyatakan moderat, R-square > 0,19 mengindikasikan bahwa model dinyatakan lemah (Ghozali, 2014). Adapun nilai R-square pada masing-masing konstruk dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Output R-Square

Konstruk	R-Square	Ket.
Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1)	-	-
Network Structuring (X2)	0.899	Baik
Efektifitas (Y)	0.950	Baik

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan nilai kriteria model di atas, konstruk Efektifitas dan variabel mediasi Network Structuring memiliki model struktural yang baik dengan nilai R-Square > 0,67. Nilai R-Square konstruk laten eksogen Network Structuring memiliki nilai sebesar 0.899. Hal ini berarti bahwa Network Structuring mampu menjelaskan konstruk Efektifitas sebesar 89,9% dan sisanya 10,1% dijelaskan oleh konstruk lain diluar model. Berdasarkan nilai kriteria model di atas, konstruk kepuasan dan rekomendasi Efektifitas memiliki model struktural yang baik dengan nilai R-Square > 0,67. Nilai R-Square konstruk laten endogen efektivitas memiliki nilai sebesar 0.950. Hal ini berarti bahwa Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) dan Network Structuring mampu menjelaskan konstruk Efektifitas sebesar 95% dan sisanya 5% dijelaskan oleh konstruk lain diluar model.

2. Menurut Ghozali (2018), bahwa nilai f2 untuk effect size, dimana model struktural yang memiliki nilai f2 > 0,02 maka model dapat dinyatakan lemah, nilai f2 > 0,15 maka model dinyatakan moderat serta nilai f2 > 0,35 maka model dapat dinyatakan besar pada tingkat struktural. Adapun nilai f2 untuk effect size pada PLS Algorithm yaitu:

Tabel 5. Output f-Square

Konstruk	X1	X2	Y	Ket.
Tata Kelola Pemerintahan (Game Management)		8.899	0.053	Moderat

(X1)		
Network Structuring	<b>1.364</b>	Moderat
(X2)		
Efektifitas (Y)		

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa ukuran efek konstruk Network Structuring terhadap Efektifitas dikategorikan besar dengan nilai 1.364. Ukuran Efek Konstruk antara Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) terhadap Efektifitas dengan di mediasi oleh Network Structuring tergolong lemah yaitu Sebesar 0,053. Hasil uji GoF didapat dari perkalian nilai akar rata-rata communalities dengan nilai akar rata-rata r-square, yang dapat ditinjau dari tabel 4.24 dan 4.25. Dari hasil perhitungan GoF di atas diperoleh nilai 0,865 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki GoF yang besar dan semakin besar nilai GoF maka semakin sesuai dalam menggambarkan sampel penelitian. Rumus untuk menghitung nilai GoF ditunjukkan pada bab persamaan berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{GoF} &= \sqrt{\text{Com}} \times \text{R2} \\ &= \sqrt{0,787} \times 0,950 \\ &= 0,865 \end{aligned}$$

**Tabel 6. R-Square**

Varabel	R-Square
Efektifitas	0,950

Sumber: Data diolah 2022

**Tabel 7. Communalities**

Variabel Konstruk	AVE Communalities
Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) (X1)	0.737
Network Structuring (X2)	0.774
Efektifitas (Y)	0.852
<b>Average</b>	<b>0,787</b>

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil dari output path coefficient di atas menunjukkan bahwa terdapat Dua hubungan konstruk yang signifikan yaitu pengaruh antara Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) terhadap Network Structuring dan juga Pengaruh tidak langsung antara Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) terhadap Efektifitas yang di mediasi oleh Network Structuring. Sementara pengaruh langsung antara Tata Kelola Pemerintahan

(Game Management) Terhadap Efektifitas tidak terjadi pengaruh yang signifikan, Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada nilai original sampel antar Konstruk sebagai berikut:

**Tabel 8. Output Original Sampel**

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values
X1 -> X2	0.948	0.938	0.038	24.643	0
X1 -> Y	0.162	0.157	0.099	1.64	0.102
X2 -> Y	0.82	0.821	0.09	9.153	0

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konstruk Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas dengan nilai T-Statistik yaitu sebesar 1,64 lebih kecil dari T-Tabel yaitu 1,65 dengan nilai original sample estimate adalah positif yaitu 0,162. Maka arah hubungan Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) terhadap Efektifitas adalah positif. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konstruk Network Structuring berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas dengan nilai T-Statistik yaitu sebesar 9,153 lebih besar dari T-Tabel yaitu 1,65 dengan nilai original sample estimate adalah positif yaitu 0,82. Maka arah hubungan Network Structuring terhadap Efektifitas adalah positif. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konstruk Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas melalui variabel Network Structuring dengan nilai T-Statistik yaitu sebesar 24,643 lebih besar dari T-Tabel yaitu 1,65 dengan nilai original sample estimate adalah positif yaitu 0,948. Maka arah hubungan Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) terhadap Efektifitas melalui variabel Network Structuring dapat dikatakan positif.

## B. Pembahasan

Pengujian terhadap 3 (tiga) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini semuanya berhasil diterima. Pembahasan berikut ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritis

dan dukungan empiris terhadap hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

1. Berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 8 dalam penelitian ini menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Game Management terhadap Efektifitas. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama ditolak, dimana Game Management pada tata Kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Efektifitas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) tidak berpengaruh terhadap Efektifitas, artinya bahwa baik atau tidak suatu inovasi Game Management yang berkaitan dengan komitmen pimpinan tidak akan mempengaruhi efektifitas dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Hasil penelitian ini berdasarkan pada uji hipotesis yang ditunjukkan oleh Tabel 8, bahwa hipotesis 2 (H2) diterima, dimana Network Structuring dalam Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat mampu pengaruhi Efektifitas Penyusunan LPPD Kabupaten Sumbawa Barat, jika dilihat dari hasil pengujian hipotesis kedua dimana nilai t-hitung lebih besar dari pada t tabel ( $9,153 > 1,655$ ) hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima, yaitu Network Structuring yang baik dapat memberikan komunikasi dan penyampaian informasi yang baik kepada tim penyusunan LPPD. pada variabel Network Structuring terhadap suatu efektifitas organisasi dengan model perspektif sistem memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan jalannya organisasi tersebut, kemudian indikator sosialisasi mampu memberikan kontribusi terhadap Efektifitas melalui kepedulian karyawan atau pegawai untuk memberikan tindakan dan tanggapan pada penyusunan LPPD terkait evaluasi dan koreksinya.
3. Hasil penelitian ini berdasarkan pada uji yang telah dilakukan didapatkan bahwa hipotesis 3 (H3) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi Game Management dengan Network Structuring

berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Efektifitas. Penerimaan hipotesis ketiga (H3) ini berarti bahwa dalam kondisi Network Structuring yang baik, Game Management memiliki hubungan yang positif dengan Efektifitas, maksudnya adalah Network Structuring akan mampu menjadi jembatan yang positif pada Tata Kelola Pemerintahan (Game Management) terhadap Efektifitas, artinya dalam Network Structuring suatu organisasi, semakin baik Game Management cenderung meningkatkan terjadinya peningkatan pada tingkat Efektifitas Penyusunan anggaran LPPD Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian juga sebaliknya Game Management akan mempunyai hubungan yang negative juga terhadap Efektifitas, dalam Network Structuring organisasi yang rendah.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan penelitian dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Indikator game management yang bisa berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas penyusunan LPPD di Kab. Sumbawa Barat adalah komitmen pimpinan (KP4), Pembentukan Tim (PT) dan Koordinasi (KO). Adapun Komitmen Pimpinan (KP) yang berpengaruh adalah keterlibatan kepala perangkat daerah dalam proses pemenuhan data kinerja perangkat daerahnya. Pembentukan Tim (PT) yang berpengaruh secara nyata dalam penyusunan LPPD di KSB adalah pembentukan tim penyusun LPPD tingkat OPD dan Koordinasi yang berpengaruh dalam efektifitas penyusunan LPPD adalah pelaksanaan rapat koordinasi menjadi sarana yang efektif dalam penyusunan LPPD.
2. Variable network structuring yang juga berpengaruh secara nyata terhadap efektifitas penyusunan LPPD di KSB adalah indikator sosialisasi (SS), sekretariat bersama (SB) dan dukungan Anggaran (AG). Sosialisasi yang berpengaruh secara nyata dalam penyusunan LPPD adalah pelaksanaan workshop, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh provinsi maupun pusat untuk tim penyusun dan pereview tingkat kabupaten. Adapun indikator sekretariat bersama yang berpengaruh terhadap penyusunan LPPD adalah

kelengkapan fasilitas, kualitas intelektual dan kesiapsiagaan aparatur di sekretariat bersama. Sedangkan indikator anggaran (AG) yang berpengaruh dalam penyusunan LPPD adalah adanya tambahan penghasilan untuk tim penyusun dan pereview LPPD.

3. Variable indikator *game management* dengan *network structuring* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan LPPD. Semakin baik *network structuring* dalam organisasi maka *game management* juga cenderung meningkat yang akan berdampak pada efektivitas penyusunan LPPD di KSB.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dari hasil penelitian dilapangan penulis dapat memberikan saran mengenai penelitian "Pengaruh Jejaring Tata Kelola Pemerintahan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyusunan LPPD Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021" yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya keterlibatan kepala perangkat daerah yang lebih optimal dalam pemenuhan data kinerja OPD sehingga data yang disampaikan sesuai yang diharapkan
2. Keberadaan tim penyusun LPPD ditingkat Kabupaten maupun OPD perannya lebih dimaksimalkan sehingga proses penyusunan LPPD di KSB lebih efektif dan selesai tepat waktu
3. Koordinasi yang sudah dilakukan selama ini baik itu melalui rapat, whatsapp group maupun desk lebih ditingkatkan lagi dan menjadi sarana informasi efektif bagi tim dan perangkat daerah selama proses penyusunan maupun evaluasi LPPD.
4. Sekretariat bersama yang menjadi inovasi tim penyusun LPPD di KSB harus terus dipertahankan dan dikembangkan dengan membuat regulasi daerah, karena kinerja Tim Sekretariat Bersama sangat berpengaruh terhadap kinerja Bagian Pemerintahan untuk dapat menyelesaikan dan menyampaikan LPPD KSB tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
5. Tambahan penghasilan atau insentif untuk tim penyusun dan pereview LPPD harus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bentuk reward bagi aparatur yang menangani berbagai macam laporan daerah termasuk LPPD.

## DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Bupati. (2019). Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Permendagri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Sekretariat Daerah.
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Akkerman, A., & Torenlid, R. (2011). Managing the environment: Effects of network ambition on agency performance. *Public Management Review*, 13(1), 159-174. <https://doi.org/10.1080/14719037.2010.501618>
- Alamsyah, A. F. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Ddaerah di Kota Makassar (Issue 1996). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Edelenbos, J., & Klijn, E. H. (2006). Managing stakeholder involvement in decision making: A comparative analysis of six interactive processes in the Netherlands. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 417-446. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui049>
- Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. *Public Money and Management*, 25(1), 27-34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x>
- Hippel, E. Von. (2007). Horizontal innovation networks - by and for users Horizontal innovation networks - by and for users. *Industrial and Corporate Change*, 16(2), 293-315.

- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2012). Governance network theory: Past, present and future. *Policy and Politics*, 40(4), 587–606. <https://doi.org/10.1332/030557312X655431>
- Klijn, E. H., Steijn, B., & Edelenbos, J. (2010). The Impact Of Network Management On Outcomes In Governance Networks. *Public Administration*, 88(4), 1063–1082. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01826.x>
- Koibur, O. F. R. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 melalui e-youtefa di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–9.
- Le Galès, P. (2001). Urban governance and policy networks: On the urban political boundedness of policy networks. A French case study. *Public Administration*, 79(1), 167–184. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00251>
- Meier, K. J., & O'Toole, L. J. (2007). Modeling public management: Empirical analysis of the management-performance nexus. *Public Management Review*, 9(4), 503–527. <https://doi.org/10.1080/14719030701726630>
- Mutiahsari, I., Azhar, A., & Thamrin, M. H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2124–2132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1018>
- O'Toole, L. J., Walker, R. M., Meier, K. J., & Boyne, G. A. (2007). Networking in a comparative context. *Public managers in the USA and the UK*. *Public Management Review*, 9(3), 401–420. <https://doi.org/10.1080/14719030701425787>
- Provan, K. G., Huang, K., & Milward, H. B. (2009). The evolution of structural embeddedness and organizational social outcomes in a centrally governed health and human services network. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(4), 873–893. <https://doi.org/10.1093/jopart/mun036>
- Skelcher, C., Mathur, N., & Smith, M. (2005). The public governance of collaborative spaces: Discourse, design and democracy. *Public Administration*, 83(3), 573–596. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2005.00463.x>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration and Society*, 43(8), 842–868. <https://doi.org/10.1177/0095399711418768>
- Suri, A. I., Ma'arif, S., & Atika, D. B. (2022). Efektivitas Layanan Pengaduan Terpusat (Studi Tentang Layanan Pengaduan SP4N Lapo! Kota Metro ). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 33–44. <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/113>
- Syafrilia, N., & Widayanti, S. (2021). PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 5, 1–23.
- Yudiatmaja, W. E., Safitri, D. P., Maya, A., & Manalu, R. (2017). Innovation Policy and Government Network in Era Decentralization: Case Study Perda City Batam No. 4 Year 2015. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 1–20. <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4516-kementerian->